



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 167 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 - 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa inflasi tingkat kota memegang peran yang penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi provinsi Kalimantan selatan dan nasional;
 - b. bahwa diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi tingkat kota guna mendukung pencapaian sasaran inflasi provinsi kalimantan selatan dan nasional maka perlu penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah periode tahun 2022 – 2024 Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2024 bertujuan untuk :
a. menjadi pedoman pengendalian inflasi daerah;
b. menjadi dasar penyusunan program kerja TPID secara periodikal;
c. evaluasi roadmap dan program kerja ke depan akan dilaporkan secara berkala TPID Provinsi dan TPIP Pusat;
d. memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah;
e. mendorong TPID membuat inovasi program.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD / Instansi pelaksana pada peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah Kota Banjarmasin tahun 2022 - 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 - 2024

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PENANGGUNG JAWAB		
			2022	2023	2024			
1	2	4	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok (34 jenis Komoditi) dipasar tradisional secara reguler Pemantauan Harga dan Stok Barang Penting pada Distributor, Agen dan Eceran Pengawasan Pendistribusian serapan Pupuk Bereksubsidi Pengawasan Pendistribusian LPG Bereksubsidi Agen dan Pangkalan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok (18 jenis Komoditi) di Tingkat Grosir, Eceran dan Penggilingan secara reguler Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Operasi Pasar komoditi beras maupun komoditas lain penyumbang inflasi utama dititik-titik strategis Pasar Murah/ Bazaar melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara <i>bundling</i> , saat HBKN maupun <i>just in time</i> pengendalian harga Menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui edukasi belanja bijak Pemberdayaan masyarakat dalam pengankekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdayalokal Diversifikasi produk bahan makanan melalui Gerakan Poda Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengembangan Kampung Hortikultura, Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Peningkatan Produksi Peternakan (pemotongan daging sapi/kerbau/kambing dan unggas/ayam di RPH dan RPU)	2022	2023	2024	7	
				4	5	6		
				2 Kali/ Minggu pada 12 Pasar Tradisional	2 Kali/ Minggu pada 15 Pasar Tradisional	2 Kali/ Minggu pada 17 Pasar Tradisional		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				12 Kali/Tahun	12 Kali/Tahun	12 Kali/Tahun		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				2 Kali/Tahun	2 Kali/Tahun	2 Kali/Tahun		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				12 Kali/Tahun	12 Kali/Tahun	12 Kali/Tahun		Dispergair, Pertamina, Bagian Perencanaan
				Harian / Penggilingan Padi	Harian / Penggilingan Padi	Harian / Penggilingan Padi		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Pasar Induk/Pasar pantauan utama BPS	Pasar Induk/Pasar pantauan utama BPS	Pasar Induk/Pasar pantauan utama BPS		TPID, TIM SATGAS PANGAN
				Dilaksanakan sepanjang tahun pada saat terjadi kelangkaan barang /indikasi kenaikan harga	Dilaksanakan sepanjang tahun pada saat terjadi kelangkaan barang /indikasi kenaikan harga	Dilaksanakan sepanjang tahun pada saat terjadi kelangkaan barang /indikasi kenaikan harga		BULOG, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				16 kali diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan / 8.000 paket sembako	16 kali diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan / 8.000 paket sembako	17 kali diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan / 8.500 paket sembako		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
HKBN, Situasional	HKBN, Situasional	HKBN, Situasional	Bank Indonesia, TPID					
10 Kelompok masyarakat yang dibina	12 Kelompok masyarakat yang dibina	14 Kelompok masyarakat yang dibina	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Variasi produk pertanian selain beras meningkat	Variasi produk pertanian selain beras meningkat	Variasi produk pertanian selain beras meningkat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Produksi Padi 6,4 ton	Produksi Padi 6,5 ton	Produksi Padi 6,6 ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Produksi hortikultura sebesar 28,48 ton	Produksi hortikultura sebesar 32,11 ton	Produksi hortikultura sebesar 35,88 ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					
Produksi Peternakan sebesar 21.681.685 ekor	Produksi Peternakan sebesar 28.018.022 ekor	Produksi Peternakan sebesar 32.522.528 ekor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					

KETERSEDIAAN PASOKAN	PRODUK DOMESTIK	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (pengelolaan dan pelayanan Tempat Pendaratan Pelelangan Ikan/TPPI)	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 9.908 ton	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 10.004 ton	Produksi Perikanan Tangkap sebesar 10.101 ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Kampung Haruan (Gabus), IWAK KOTA, Tambak Iken Keramba, Bantuan Bibit ikan, Pakan dan peralatan)	Produksi Perikanan Budidaya sebesar 2.708 ton	Produksi Perikanan Budidaya sebesar 2.979 ton	Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3.277 ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Mengurangi ketergantungan produk segar melalui pengenalan produk olahan kepada masyarakat dan memproduksi produk olahan (cabe bubuk/bawang goreng, dll)	UMKM dan Rumah Tangga	UMKM dan Rumah Tangga	UMKM dan Rumah Tangga	Dinas Koperasi UMNAKER
		Modernisasi pengolahan / meningkatkan mutu produk olahan	Membangun Rumah Kemasan	Produk olahan dengan kemasan sesuai standard	Produk olahan dengan kemasan sesuai standard	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi UMNAKER, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PENGUATAN CADANGAN PASOKAN PEMERINTAH	Menjaga ketersediaan Beras Medium dalam jumlah yang cukup sebagai Cadangan Beras Pemerintah baik untuk kegiatan KPSH/OP CBP dalam rangka stabilisasi harga maupun penyaluran bantuan dalam kondisi darurat.	5.000 ton/tahun	5.000 ton/tahun	5.000 ton/tahun	BULOG
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat	Beras 10ton	Beras 12 ton	Beras 15ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PENGUATAN KELEMBAGAAN	Pendampingan dan pemberian bantuan modal kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	12 Kelompok	14 Kelompok	16 Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Mendorong Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat berupa Toko Tani Indonesia (TTI) untuk memotong rantai pasok pangan menjadi pendek (Petani ke Gapoktan, dari Gapoktan ke TTI dan langsung ke konsumen akhir		2 unit	2 unit	2 unit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
KELANCARAN DISTRIBUSI	PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD)	Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota penghasil bahan pangan pokok pendorong inflasi	1 daerah	1 daerah	1 daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Bag. Tapem
		Pengembangan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Pangan Kita (TPK) di Pasar pantauan BPS	250 RPK	250 RPK	250 RPK	BULOG
	Peningkatan infrastruktur Rumah Potong Hewan/Unggas dengan fasilitas gudang (Cold Storage)	-	1 Unit	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Revitalisasi Pasar Tradisional yang dilengkapi dengan fasilitas gudang (Cold Storage)	-	1 unit	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PERUMDA PASAR	
	Pendirian Perumda Pasar	Porda Pendirian Perumda Pasar	Beroperasinya Perumda Pasar	Beroperasinya Perumda Pasar	Bagian Perokonomian dan SDA, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PERUMDA PASAR	

	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN	Mendorong fasilitasi dan advisory UMKM untuk memanfaatkan platform digital farming	Platform e-commerce terutama untuk penjualan Bahan Pangan Segar maupun Produk Olahan	Platform e-commerce terutama untuk penjualan Bahan Pangan Segar maupun Produk Olahan	Platform e-commerce terutama untuk penjualan Bahan Pangan Segar maupun Produk Olahan	Diskominfotik, Dinas Koperasi dan UMNAKER, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan
		Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharannya	Tercapainya kemantapan jalan kota terutama jalan wilayah produksi bahan pangan dan jalur distribusi barang	Tercapainya kemantapan jalan kota terutama jalan wilayah produksi bahan pangan dan jalur distribusi barang	Tercapainya kemantapan jalan kota terutama jalan wilayah produksi bahan pangan dan jalur distribusi barang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan
		Peningkatan pelayanan angkutan barang	Peningkatan layanan angkutan barang melalui transportasi sungai di dermaga Banjar Raya, Pasar Lima dan Pasar Baru	Peningkatan layanan angkutan barang melalui transportasi sungai di dermaga Banjar Raya, Pasar Lima dan Pasar Baru	Peningkatan layanan angkutan barang melalui transportasi sungai di dermaga Banjar Raya, Pasar Lima dan Pasar Baru	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI EFEKTIF	MEMPERBAIKI KUALITAS DATA	Perluasan pemanfaatan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) sebagai landasan kebijakan TPID	Publikasi	Evaluasi Kesenambungan	Evaluasi dan pemanfaatan untuk asesmen	BI
		Pengembangan Sistem Informasi Harga, Stok dan Produksi dari Website ke SI BAPOK ke Aplikasi	Aplikasi Mobile berbasis Sistem Android dan IOS	Pengembangan Aplikasi	Pengembangan Aplikasi	Diskominfotik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengembangan Sistem Informasi Gas LPG Untuk Harian warga Kota Banjarmasin (SI GALUH)	Aplikasi Mobile berbasis Sistem Android dan IOS	Pengembangan Aplikasi	Pengembangan Aplikasi	Diskominfotik, Bagian Perekonomian dan SDA
	PENGUATAN KOORDINASI TPID	Rapat Koordinasi TPID (High Level Meeting) / Rapat Koordinasi Bulanan TPID Kota Banjarmasin	Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Kepala Daerah minimal 3 kali/tahun	Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Kepala Daerah minimal 3 kali/tahun	Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Kepala Daerah minimal 3 kali/tahun	TPID
		Penguatan kelembagaan antar instansi anggota TPID melalui Capacity Building (Workshop, Sosialisasi , Studi Tiru)	Maksimal 6 kali/tahun	Maksimal 6 kali/tahun	Maksimal 6 kali/tahun	TPID
	MENGENDALIKAN EKSPEKTASI INFLASI	Peningkatan validitas dan kesinambungan data Pelaksanaan bauran Kebijakan yg kredible untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya. CF terjaga dikisaran sasaran inflasi	3 ± 1%	3 ± 1%	2,5 ± 1%	BI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA